

PERGULATAN POLITIK PESANTREN ERA REFORMASI (STUDI INTERAKSI PESANTREN DENGAN PARTAI POLITIK DI KAB. BANYUMAS)

Anjar Nugroho

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

anjar@ump.ac.id

Abstrak

The focus of this study examines the roles of pesantren politics during the reform period; the form of political maneuvering of political parties and the current response of pesantren, as well as the background of pesantren thought. Particularly, it is an analyze of the relation of pesantren with economic and political interests in the multi-party reform an the era of political configuration. Although most of the pesantren leaders (kiai) in Banyumas show an open attitude towards political parties, especially political parties based on Islam, but concretely, their concrete choices are influenced by various factors, especially cultural-ideological and structural-organizational factors. Second, for political parties, the kiai's position is crucial, in terms of providing political and cultural legitimacy to their constituents.

Keywords: Islamic Politics, Pesantren and Political Parties, Kiai

Abstrak

Fokus dari studi ini adalah menjelaskan peran politik pesantren selama periode reformasi; bentuk manuver politik partai politik dan respon pesantren saat ini, serta latar belakang pemikiran pesantren. Khususnya, ini adalah analisis tentang hubungan pesantren dengan kepentingan ekonomi dan politik dalam reformasi multi-partai dan era konfigurasi politik. Meskipun sebagian besar pemimpin pesantren (kiai) di Banyumas menunjukkan sikap terbuka terhadap partai politik, terutama partai politik berdasarkan Islam, tetapi dalam prakteknya, pilihan konkrit mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor; *pertama*, faktor budaya-ideologis dan struktural-organisasi. *Kedua*, untuk partai politik, posisi kiai sangat penting, dalam hal memberikan legitimasi politik dan budaya kepada konstituen mereka.

Kata kunci: Politik Islam, Pesantren dan Partai Politik, Kiai

Pendahuluan

Dalam sejarah pergerakan sosial di Indonesia, lembaga pendidikan pesantren memiliki peran besar dalam eskalasi - baik secara revolusioner-radikal maupun evolusioner-gradual - yang meliputi aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial maupun dalam bentuk perjuangan kebudayaan. Pelbagai bentuk gerakan protes yang melibatkan masyarakat petani pada abad ke-19 dan 20, secara umum dimotori oleh para kiai, yang ternyata mereka adalah sosok kharismatik berbasis pesantren atau mereka yang memiliki jaringan tarekat (Muhaimin, 2007: 1-28). Peran strategis dalam gerakan tersebut terjadi karena adanya hubungan dinamis antara guru-murid, antara kiai-santri atau secara umum antara patron dan klien. Mengenai peran tersebut, Robert W. Hefner mencatat demikian :

“Colonial-era pesantren were also important because they provided the a transiocal network for native authority apart from state. In Java and Sumatera many of the movements of pre-nationalism were led by graduates of these school. In the national era (1945 on), Islamic school have provided the leadership for Indonesia’s lergest social and political organization, the Nahdlatul Ulama”. (Hefner, 2000 : 34)

Kendati Hefner dalam pernyataan tersebut di atas merujuk pada fenomena yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama, namun bila dicermati lebih jauh, sesungguhnya fenomena yang sama juga menjadi bagian dari organisasi sosial keagamaan lain yang berbasis Islam, seperti Muhammadiyah (Alfian, 2008), Persatuan Islam (Persis) (Federspiel, 1997: 39-62) dan sebagainya.

Di Indonesia, model pendidikan pesantren telah menjadi gejala umum hampir semua organisasi keagamaan, dengan pelbagai modifikasi sistem pendidikannya sesuai dengan perkembangan modernitas tentunya, dan yang terbesar diantaranya dimiliki Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di mana keduanya berbasis pada pendidikan (Faillard, 1999: 356), serta memiliki peran signifikan dalam konstelasi politik Indonesia

modern, baik di era Kolonial, Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai era reformasi yang mulai bergulir tahun 1998.

Posisi pesanten sebagai salah satu lembaga pendidikan masyarakat yang sering diidentikkan dengan rakyat pedesaan, secara otomatis posisinya erat dengan tradisi lokal serta otoritas yang dimiliki para kiainya. Hal ini seringkali menjadi arena perebutan legitimasi bagi kepentingan-kepentingan di bidang sosial dan politik. Bahkan pada masa kolonial, peran pesantren cukup besar dalam membangun kesadaran di masyarakat melalui pengajaran nilai-nilai keagamaan Islam, sehingga secara politik dan kebudayaan, para kolonialis berpendapat bahwa mereka perlu “ditundukkan” (Hurgronje, 1994).

Pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, barangkali dapat dikatakan sebagai periode yang paling ‘dinamis’ atau lebih tepatnya paradoks dengan wacana politik Islam, khususnya dalam menyikapi peran pesantren. Untuk membangun legitimasi yang kuat secara kultural, pesantren sering didekati dan dimanfaatkan, terutama pada saat menjelang pemilu. Misalnya, oleh Golkar yang saat itu menjadi ‘partai’ pemerintah. Sebaliknya rejim ini juga tidak segan untuk menampilkan tangan besinya ketika menghadapi riak-riak politik yang muncul dan berakar dari dalam lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Kedinamisan itu berlanjut sampai jatuhnya rezim Orde Baru.

Bergulirnya masa transisi pada jaman Presiden Habibie (1998-1999) dan pada saat bersamaan lahirnya era reformasi, telah membuka tabir ideologis dan kesempatan pada hampir seluruh kelompok-kelompok sosial yang ada. Konsekuensinya, tarik-menarik antar kepentingan sosial politik yang lama dengan konfigurasi baru partai-partai Islam sebagai hasil dari transformasi ormas Islam menjadi partai politik, semakin kuat terjadi. Hal ini tidak terkecuali juga berimbas pada pesantren-pesantren yang secara kultural ‘independen’ namun masih mempunyai potensi kuat untuk melakukan mobilitas politik.

Kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari tubuh NU, kelahiran Partai Amanah Nasional (PAN) dari rahim Muhammadiyah, serta Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai ‘penjelmaan’ dari Masyumi yang didukung oleh tokoh-tokoh muda. Demikian pula esistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) buah dari fusi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang didominasi kelompok NU dan MI, semakin mendinamisasikan horizon politik pesantren, yang kemudian partai politik memiliki kesempatan untuk melakukan gerakan politiknya melalui pesantren. Pada saat yang sama pesantren mampu menampilkan keanekaragaman sikap dalam menghadapi pilihan-pilihan politiknya, baik pilihan ideologi maupun politiknya.

Untuk itu, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji peran politik pesantren pada masa reformasi dan post-reformasi (1999-2015); bentuk manuver politik dari partai politik sekaligus respon pesantren pada saat ini, serta latar belakang pemikiran dan alasan-alasan yang dimunculkan pesantren. Bagian khusus yang akan dianalisis adalah relasi pesantren dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dalam konfigurasi politik era reformasi yang multi partai.

Dari paparan latar belakang di atas, untuk lebih menjelaskan tentang penelitian ini, secara spesifik dapat dirumuskan masalah sebagai berikut; bagaimana bentuk-bentuk manuver politik partai politik dalam mengakomodasikan peran politik pesantren untuk mendapatkan legitimasi kultural-politik, bagaimana pesantren penentuan pilihan afiliasi politiknya terhadap partai tertentu dan bagaimana pula bentuk interaksi politik yang dilakukan sebagai konsekwensi dari pilihan tersebut, dan apa yang melatar belakangi pesantren dalam menentukan pilihan politik tersebut.

Relasi Pesantren dan Politik

Partisipasi Muslim dalam bidang politik telah menghiasi percaturan politik tanah air, bahkan sejak negara ini belum merdeka dan mulai diperkenalkannya sistem politik demo-

kratis modern. Tercatat sejak tahun 1929 Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) berdiri sebagai suatu wadah perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Kemudian pada tahun 1945 berdiri partai politik Islam Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan umat Islam dalam bidang politik, meski kemudian partai ini terpecah dengan keluarnya NU dan PSII (Editor GIP, 1998). Dalam perjalanan selanjutnya partai politik Islam mengalami pasang surut, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa umat Islam mempunyai kiprah dan partisipasi aktif dalam konstelasi politik di Indonesia.

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara bukan sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran Islam. Nama-nama seperti Al-Iji yang mewakili kaum Sunni, Al-Jubba'I dan Al-Fuwati yang mewakili kaum Mu'tazilah, Al-Tusi dari golongan Syi'ah, Kaum Khawarij dan Ibnu Taymiyah, telah lama menjadi kajian dan rujukan pembahasan tentang politik dan negara di antara kaum Muslimin (Qomaruddin Khan, 2010 : 24 -29). Tema utama dari perdebatan para ulama klasik adalah tentang perlunya Imamah dalam masyarakat Islam.

Banyak keterangan dan penjelasan dalam Al-Qur'an tentang kekuasaan dan otoritas dalam berbagai konteks, tapi tidak menunjukkan bagaimana sebuah negara ideal harus berbentuk. Kata khalifah dan istilah-istilah kepemimpinan lain banyak terdapat dalam Kitab Suci, akan tetapi hanya merujuk pada pengertian kemungkinan teralisasinya kekuasaan politik Muslim di dunia, dan tidak menjelaskan prinsip-prinsip politik sebagai bagian dari dasar agama untuk mengatur negara. Hal yang sama juga terjadi pada hadits Nabi. Hal inilah yang menjelaskan mengapa para penerus Nabi memilih berbagai bentuk pemerintahan. (ibid : 23).

Selanjutnya hal tersebut juga menjadi penyebab dari berbedanya berbagai pendapat ulama tentang bagaimana asal dan bentuk negara dalam Islam. Sebagai contoh, ulama Sunni Al-Iji berpendapat bahwa Imamah bukanlah kepercayaan dasar (*fundament faith*) dan praktik keagamaan Islam, sebagaimana

yang diyakini oleh kaum Syi'ah. Menurut kaum Sunni, Imamah (konsep kepemimpinan yang harus ditaati oleh seluruh kaum muslimin) hanya merupakan masalah cabang (*furu'*) saja yang berkenaan dengan tindakan dari kaum muslim. Sedang pengangkatan seorang imam dalam masyarakat (*ummah*) hanya didasarkan pada tradisi (*al-sam'*) saja, di mana tradisi ini merupakan gabungan dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' (kesepakatan) ulama.

Sunnah Nabi telah menunjukkan bagaimana Nabi mengatur ummatnya dan mengangkat para administrator untuk melaksanakan urusan umat, mengembalikan sesuatu pada yang berhak dan untuk berperilaku adil dalam pelaksanaan keadilan. Nabi juga bersabda bahwa apabila tiga orang diantara kaum Muslim bepergian, maka hendaklah mengangkat salah seorang diantaranya menjadi pemimpin.

Pada masa modern perdebatan tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara masih tetap terjadi dengan intensitas yang beragam. Wacana ini kemudian menciptakan dikotomi dalam kelompok-kelompok dan pemikir muslim. Kelompok Islam di sini adalah mereka yang mengejawantahkan penafsiran atas sumber-sumber asli Islam melalui berbagai organisasi, sedang pemikir muslim adalah mereka yang berkecimpung dalam pengembangan pemikiran tapi tidak secara khusus terjun dalam kelompok-kelompok tertentu. Kelompok yang berpendapat tentang perlunya khilafah Islam biasanya disebut dengan fundamentalis atau garis keras, sedang mereka yang berada disebaliknya disebut dengan modernis atau liberal dan nasionalis. Demikian juga dengan para pemikirnya.

Relasi pesantren sebagai sebuah entitas komunal yang independen dari hampir semua organisasi sosial keagamaan maupun organisasi politik, agaknya bukan berarti bahwa ia bersifat *immune* dari 'intervensi' partai-partai politik. Secara ideologis pesantren memang berperan sebagai media transformasi pendidikan yang diorientasikan untuk mencetak kader-kader santri yang mampu 'melestarikan' dan melanjutkan per-

juangan kultural dari ‘ideologi’ yang dianut oleh pesantren itu sendiri. Dalam kasus NU, misalnya, upaya untuk melanjutkan ajaran Islam dengan model *ahli sunnah wa al-jama’ah* (Baehaqi, 2012), telah menjadikan pesantren sebagai media yang paling efektif untuk sebuah mobilitas kultural.

Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa keterkaitan antara pesantren dengan politik dapat dipahami dengan melihat kedudukan pesantren sebagai ‘*trustee*’ masyarakat santri, di mana para santri ini mengaharap bimbingan kultural, khususnya dalam hubungannya dengan Islam. Pesantren secara keseluruhan mempunyai peranan dalam mendefinisikan situasi pada umat Islam, khususnya untuk kaum santri. Pendefinisian itu menghasilkan suatu pandangan politik tertentu, yang pada gilirannya melahirkan pengelompokan politik tertentu pula (Madjid, 1997: 73). Dengan merujuk pada kasus kampanye Golkar di pondok-pondok pesantren, seperti, pesantren Rejoso dan Burengan, ternyata Golkar berhasil melakukan artikulasi politiknya melalui pesantren-pesantren tersebut pada saat menjelang pemilu tahun 1971. Kendati demikian, Pondok Modern Gontor mampu menunjukkan independensinya dan mempertegas dirinya untuk tidak terlibat jauh dalam wilayah politik. Di sini jelas terlihat bahwa Golkar yang pada saat itu bersama-sama dengan pemerintah berupaya ‘memisahkan’ pesantren –yang memiliki sub-kultur NU – dari tubuh NU sendiri secara politik.

Dari hasil pemaparan Kompas tanggal 14 Oktober 1996 yang berjudul “Pesantren: dari Pendidikan Hingga Politik”, tergambar bahwa sebagai kelompok elit pedesaan – baik dari struktur sosial, ekonomi maupun politik – kiai mempunyai pengaruh dan kharisma yang kuat, yang menempatkan mereka menjadi kekuatan politik tersendiri dalam sejarah politik Indonesia. Kenyataan ini menyadarkan banyak pihak bahwa kiai dan ulama mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan politik. Kekuatan ini yang membuat kiai beserta pesantrennya selalu menjadi sasaran ‘tarik-menarik’ antar kekuatan sosial

politik hingga kini. Gambaran tersebut terbukti ketika NU dalam pemilu 1955 didukung oleh sebagian besar kiai ulama sehingga dapat tampil dalam jajaran empat besar partai politik di Indonesia saat itu.

Tarik-menarik yang terjadi memang bukan hanya antara pesantren dengan kepentingan politik, namun lebih dari itu, 'ketegangan ideologis' kadang terjadi ketika sebuah pesantren berdiri di suatu lingkungan masyarakat. Menurut Mastuhu, kelahiran pesantren baru selalu diawali dengan cerita perang nilai antara pesantren yang akan berdiri dengan masyarakat sekitar, dan diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren dapat diterima untuk hidup di masyarakat sekitar dalam bidang kehidupan moral (Mastuhu, 1994). Oleh karena itu, kedudukan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga penyiaran agama. Di samping itu, ia merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat, dan tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan pesantren sebagai lembaga pendidikan *grass root people* yang sangat menyatu dengan kehidupan mereka (Rahardjo, 1983; Steenbrik, 1986; Suherman, 1984).

Setiap pesantren memiliki elemen-elemen dasar, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai. Dari lima elemen inilah kiai yang paling pokok, karena ia merupakan pendiri, pengembang, dan pengatur mekanisme jalannya pesantren. Namun ini tidak berarti elemen-elemen lainnya menjadi kurang penting (Maridjan, 2010 : 40). Posisi seorang pimpinan dalam dunia pesantren betul-betul sangat signifikan, bukan saja berperan sebagai ketua lembaga pendidikan biasa, lebih dari itu, sebagaimana digambarkan oleh Hiroko Horikoshi (1987) dalam, "*The Traditional in a Time of Change : The Kiai and Ulama in Java*", ketika mengulas peran kiai di Tasikmalaya, Jawa Barat, bahwa kiai mampu berperan sebagai pemimpin spiritual, yang sampai pada tahap tertentu menjadi sistem kepercayaan tersendiri dalam pesantren dan independen dari sistem organisasi yang lain, termasuk ormas ataupun orsospol.

Peran kharismatik kiai ini ditampilkan pula misalnya oleh Manfred Ziemek etika mengupas peran “*Pesantren dan Perubahan Sosial*”. Kenyataan bahwa nama dan pengaruh sebuah pesantren berkaitan erat dengan masing-masing kiai, telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian seorang pemimpin pesantren menentukan kedudukan dan tingkat suatu pesantren. Bila pada saat pendirian sebuah pesantren, kepemimpinan dan kecakapan seorang kiai menggerakkan massa merupakan faktor menentukan. Ia mengajak penduduk sekitar bekerja dan turut serta dalam pembiayaan, selanjutnya ia sering dapat membangun peran strategisnya sebagai pemimpin masyarakat yang non formal melalui suatu komunikasi yang intensif dengan penduduk (Marijan, 2010 : 40). Oleh sebab itu, sifat dan potensi kepemimpinan kiai semacam itu akan memiliki peran yang tidak jauh berbeda ketika dikaitkan dengan masalah politik. Namun dari pelbagai tulisan tentang pesantren, kebanyakan pembahasan difokuskan pada masalah pendidikan, kultur, pandangan keagamaan ataupun perubahan sosial ekonomi, dan belum banyak pembahasan yang terfokus pada peran pesantren dan relasi politiknya secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini, selain menarik karena sifat kontekstualnya, juga signifikan untuk ditelaah lebih lanjut.

Tipologi dan Jaringan Pesantren di Banyumas

Banyumas dan sekitarnya memang lebih dikenal sebagai kampung santri. Terdapat banyak pesantren ukuran sedang dan kecil di kampung ini yang masing-masing memiliki ciri khas dan otoritas tersendiri. Setidaknya ada 8 pondok pesantren yang berskala besar, dan puluhan lainnya berskala kecil. Minat para santri untuk menuntut ilmu di Banyumas masih cukup besar.

Tipologi pesantren-pesantren di Banyumas, bila menggunakan pembagian yang dilakukan oleh Zamachsyari Dhofier, dapat digolongkan kepada pesantren kecil. Kriteria pesantren besar yang dilansir Dhofier adalah pesantren yang memiliki

banyak santri, sampai mencapai ribuan, misalnya Pondok Pesantren Gontor atau Lirboyo. Di seluruh Jawa, menurut Dhofier, orang biasanya membedakan kelas pesantren dalam tiga kelompok, yaitu pesantren kecil, menengah, dan pesantren besar. Pesantren yang tergolong kecil biasanya mempunyai santri di bawah seribu dan pengaruhnya terbatas pada tingkatan kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai santri antara 1000 sampai dengan 2000 Orang, memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten. Pesantren besar biasanya memiliki santri lebih dari 2000 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan propinsi (Dhofier, 1982: 44).

Sedangkan para santri di tiap-tiap pesantren di Banyumas kurang lebih berjumlah ratusan, tidak ada yang mencapai ribuan. Kendati dapat digolongkan kecil dari segi jumlah santrinya, tapi jumlah pesantren di kabupaten ini banyak, dan bila santri-santri dari pesantren tersebut dijumlahkan, jumlah santri bisa mencapai ribuan.

Hubungan antara satu pondok pesantren dengan pondok pesantren lainnya terjalin cukup erat. Hal ini biasanya nampak dalam kegiatan *khataman* yang hampir tiap tahun digelar. Tiap-tiap pesantren sebetulnya memiliki agenda tersendiri dalam hal ini, namun demikian, waktu *khataman* kadang terjadi dan disyukuri dalam waktu yang bersamaan. Bila acara khataman sudah tiba, maka masing-masing pesantren biasanya mengirimkan santrinya untuk ikut serta dalam acara *tasyakuran* dari pesantren lain.

Semua santri belajar kitab secara tradisional, yang dibagi ke dalam tiga kelompok dengan kitab pegangan yang berbeda. Untuk kelompok I, kitab yang digunakan adalah *Jurumiyah*, *Safinah*, dan *Jawahirul Kalamiyah*. Untuk kelompok II digunakan kitab *Imriti*, *Taqrib*, dan *Tafsir Yasin*, ditambah dengan *Tashrifan* (ilmu Sharaf). Sedangkan kelompok III, kitab yang digunakan adalah *Alfiyah*, *Yaqulu*, *Farhul Wahab*, dan *Tafsir Jalalain*. Menurut Kiai Azis semua pondok pesantren di

Banyumas menggunakan metode pembelajaran yang sama. Hal itu disebabkan pondok-pondok pesantren di Banyumas mempunyai sumber pendidikan yang berasal dari tradisi Nahdlatul Ulama. Persamaan pandangan ini jika dirunut sejarahnya disebabkan hubungan kekerabatan antar pondok pesantren di Banyumas.

Keeratan Nahdlatul Ulama dengan pesantren selaras dengan tujuannya yang hendak melestarikan ajaran *Ashlus-sunnah wal Jamaah*, yang tercermin dari diajarkannya kitab-kitab klasik (kuning). Pesantren mempunyai perkembangan yang cukup unik. Antara pesantren dengan pesantren lain pada umumnya terdapat suatu jaringan hubungan genealogis yang rumit dan kokoh. Jaringan ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia lebih merupakan buah dari upaya melestarikan tradisi pesantren yang dilakukan dengan membangun solidaritas dan kerjasama yang kuat di antara sesama kiai.

Cara praktis yang ditempuh untuk itu antara lain adalah dengan mengembangkan suatu jaringan perkawinan *endogamous* di antara keluarga kiai: kaitan pesantren satu sama lainnya diperkuat oleh hubungan kekerabatan serta dipererat dengan perkawinan antara putra-putri kiai satu dengan lainnya. Eratnya hubungan antar pesantren yang diikat oleh tali kekerabatan ini, yang tentu saja ditopang oleh soko guru ikatan tali akidah, menjadikan pesantren sangat potensial sebagai basis gerakan politik. Inilah akar Nahdlatul Ulama.⁴⁵ Bagi kalangan Nahdlatul Ulama, penumbuhan kader rupanya lebih dilakukan secara informal melalui pesantren, dan secara formal melalui gerakan Pemuda Anshor. Pandangan Hormat kepada kiai, baik di dalam pesantren maupun di dalam Nahdlatul Ulama memang lebih mempermudah pengaderan. (Noer, 1987: 445)

Hal tersebut sedikit banyak memiliki implikasi psikologis yang cukup kuat di antara para pengurus pesantren maupun ormas itu sendiri, yang dalam periode berikutnya, sebagaimana akan dibahas dalam poin berikutnya, terlibat dalam arus per-

gulatan politik pada tingkat nasional. Misalnya saja, ketika Nahdlatul Ulama, ataupun para tokoh Nahdlatul Ulama melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyalurkan aspirasi politiknya, maka beberapa komponen yang terlibat secara organisasi dengan Ormas Islam ini, bukan tidak mungkin ikut ambil bagian.

Oleh karena itu, jaringan pesantren sendiri sesungguhnya tidak hanya terletak pada aspek keturunan atau kekerabatan, atau juga hubungan antara mantan guru dan murid, lebih dari itu adalah hubungan organisatoris atau hubungan dalam hal yang berkaitan dengan aspek-aspek ideologis dan politis juga merupakan bentuk jaringan tersendiri yang ikut mendinamiskan pergulatan sosial dan politik di kampung santri ini.

Pergulatan Sosial dan Politik Pesantren di Banyumas Pesantren dan politik: sebuah dinamika

Relasi dan afiliasi orang-orang pesantren dalam partai politik sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Kenneth E. Ward, seorang peneliti dari Australia, pernah menyebut Nahdlatul Ulama sebagai *the pesantren in politics*. Maksudnya adalah partai Nahdlatul Ulama menjadi saluran organisasi politik kaum santri. Hal ini didasarkan pada hasil penelitiannya mengenai pelaksanaan pemilu 1971 di Jawa Timur. (Ward, 1995: 30-31)

Di samping karena para pendiri organisasi ini berasal dari tokoh pesantren, dalam perjalanan selanjutnya pesantren merupakan basis politik dan sumber yang menyediakan tenaga-tenaga untuk mengisi dua elemen utama Nahdlatul Ulama, yakni ulama dan politik. (Asfar, 1996: 31)

Jauh sebelum itu, orang-orang pesantren sudah banyak terlibat dalam partai politik Islam, termasuk Masyumi, yang salah satu komponen di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalaupun tidak terlibat secara langsung, namun perhatian organisasi ini terhadap persoalan-persoalan politik kebangsaan tidak pernah sirna. Misalnya Nahdlatul Ulama pernah mendirikan Majelis Pimpinan Politik yang

berfungsi memberikan nasihat dalam bidang politik pada pimpinan organisasi, ketika friksi di dalam tubuh Masyumi meningkat (Noer, 1987: 90). Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammadiyah, meski organisasi yang dijuluki pembaharu ini tidak sampai mengubah dirinya menjadi partai politik seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama.

Kelompok modernis menganggap diri mereka lebih tahu dan lebih berpengalaman dalam soal-soal politik ketimbang orang-orang pesantren, terutama mengingat latar belakang pendidikan Barat mereka. Fenomena inilah yang menyebabkan kebanyakan tokoh Nahdlatul Ulama merasa diabaikan oleh kepemimpinan modernis di dunia politik, suatu dunia yang cukup menarik minat para kiai pada periode pasca kemerdekaan (Ma'arif: 117). Dalam konteks yang lain, pada saat pemerintah melakukan penyederhanaan partai pada tahun 1973, Nahdlatul Ulama bersama partai-partai Islam lainnya menjadi satu dalam PPP. Berbagai konflik yang terjadi dalam tubuh PPP, yang berpusat pada persaingan kekuasaan dan perebutan pengaruh, akhirnya membawa Nahdlatul Ulama, pada musyawarah nasional Nahdaltul Ulama pada tahun 1984 di Situbondo, keluar dari PPP, dan kembali menjadi organisasi keagamaan. Peristiwa itu dikenal dengan kembali kepada khittah (semangat) 1926. (Dirjosantoyo, 1999: 205).

Nampaknya sejarah terus berulang, meski dengan bingkai cerita yang agak berbeda. Pada Masa Orde Baru, horizon pesantren dalam konstelasi politik lokal nampak cukup kental, setidaknya hal ini telah ditunjukkan oleh pelbagai sikap politik yang ditunjukkan oleh para kiai. Meskipun pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, namun dalam menyalurkan aspirasi politik, masing-masing kiai memiliki argumetasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung bagaimana mereka memandang keterkaitan antara agama dan politik.

Dalam kaitan ini, sejauh menyangkut format politik baru pasca restrukturisasi, kelihatannya hanya partai yang berku-

asa, Golkar, yang sangat siap untuk itu, dan karenanya, mampu mengambil keuntungan dari struktur politik yang baru tersebut. Menurut Muhammad AS. Hikam, Golkar yang berasal dari kelompok fungsional, pada awal tahun 60-an, telah mengubah diri dalam sekejap setelah keruntuhan Demokrasi Terpimpin, untuk menjadi mesin politik Orde Baru (Hikam, 1994: 79). Kemudian, dalam upaya untuk meminimalisasi konflik-konflik politik dan ideologi, negara juga melarang organisasi sosial politik maupun organisasi massa memakai ideologi lain, kecuali Pancasila, sebagai basis diskursus politik mereka (Hikam, 1994: 79).

Sikap Politik Kiai Pesantren Pada Masa Orde Baru-Reformasi: Sebuah Peta

Keragaman sikap pesantren, terutama para kiaiinya, dalam merepons situasi politik pada masa Orde Baru cukup dinamis. Terjadi beberapa daerah dimana lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, eksis cukup banyak, terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, kendati dikatakan oleh banyak kalangan bahwa otoritas kiai sangat kuat dalam sebuah pesantren, namun dalam persoalan pilihan politik hal itu tidak selalu selaras dengan para santrinya.

Sampai tahun 1971, ketika pemilihan umum pertama kali diadakan pada masa Orde Baru, afiliasi politik kiai relatif mudah diidentifikasi. Hal ini bisa dilihat dari besarnya dukungan para kiai dan pesantren pada partai Nahdlatul Ulama, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, disamping dukungan kiai dan pesantren pada partai-partai Islam yang lain seperti Parmusi, Perti, dan PSII. (Asfar, 1998: 31)

Namun persoalan menjadi agak lain ketika pada tahun 1973 terjadi fusi partakhususnya partai-partai Islam ke dalam PPP. Meskipun dalam banyak kasus afiliasi politik kiai pada masa itu dapat diidentifikasi dengan PPP, agaknya mulai muncul dukungan secara terbuka dari beberapa kiai dan lingkungan pondok pesantren tertentu kepada partai selain PPP, yakni Golkar. Beberapa kiai yang secara terbuka mendukung

Golkar pada waktu itu misalnya, K.H. Mustain Romly (Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang); Karim Hasjim (Putra Kiai Hasjim Asy'ari dari Pesantren Tebuireng, Jombang); Badrus Shaleh dari Kediri; dan Kiai Zaini dari Probolinggo; dan sebagainya. Bahkan ada beberapa kiai setelah pesantrennya mendapat bantuan dana dari pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, kemudian mendukung Golkar, seperti Pondok Pesantren Al-Kamal, Blitar; Pondok Pesantren Sabilul Muttagiien, Takeran; Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan, Lombok Timur yang dalam Pemilu 1955 merupakan pendukung utama Masyumi (Asfar, 1998: 31).

Peta politik kiai di atas menunjukkan bahwasanya Partai Islam pada mulanya merupakan afiliasi utama dari kaum pesantren, meski kemudian pelbagai faktor sosial dan ekonomi serta barangkali juga idealisme ikut mendinamiskan horizon pilihan politik kiai. Dengan demikian, sebagai kesimpulan sementara, bahwa faktor ideologis masih merupakan penentu yang mempengaruhi sebuah pilihan politik. Dalam konteks ini, beberapa pesantren di Banyumas nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan pesantren-pesantren yang terdapat di Jawa Timur sebagaimana digambarkan di atas. Sebelum era reformasi bergulir yang kemudian diikuti dengan munculnya partai-partai baru, afiliasi politik para kiai di Banyumas, baik langsung maupun tidak, lebih banyak berpihak kepada partai Islam, yang saat itu diwakili oleh PPP.

Peta politik di Banyumas

Setelah kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, bangsa Indonesia mulai memasuki horizon politik baru, yakni era reformasi, dengan ditandai lahirnya partai-partai politik baru yang didasarkan pada pelbagai macam ideologi. Pada Pemilu 1999, yang kurang lebih diikuti oleh 48 partai politik misalnya, 34 dari 48 partai menyebutkan Pancasila yang merupakan Dasar Negara, sebagai dasar organisasinya. Tujuh partai menyebutkan Islam dan Pancasila secara bersamaan, dan tiga partai politik menyebutkan Pancasila saja, meski para

penggagasnya dikenal sebagai aktivis Muslim (Partai Cinta Damai, Partai Daulat Rakyat, and Partai Republik). 12 belas partai politik tidak menggunakan Pancasila sama sekali. Sebagai gantinya, mereka menyebutkan secara eksplisit *Dînul Islam* atau Quran dan Hadits sebagai dasar mereka. Satu partai politik (PRD) menyebutkan demokrasi sosial sebagai dasarnya, dan yang lainnya menyebutkan demokrasi religius (PUDI). Dengan demikian, dari 48 partai politik yang ada, sekitar 20 sampai 21 partai dalam diidentifikasi sebagai partai politik Islam. Dari sekian banyak partai, termasuk partai-partai berlabel Islam, manakah yang mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat Banyumas?

Pesta politik pada tahun 1999 mendapat respons yang cukup dinamis dari kiai Banyumas. Beberapa partai yang berbasis Islam, seperti PPP, maupun yang memiliki basis kultural cukup kuat meski tidak secara nyata menunjukkan sebagai sebuah partai Islam, misalnya PKB, merupakan partai-partai yang paling memungkinkan untuk mendapat tempat di mata kiai Banyumas. Namun demikian, mayoritas pilihan kiai Banyumas nampaknya lebih kepada partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Hal ini, tentu saja, tidak lepas dari hubungan kultural dan organisatoris antara Nahdlatul Ulama dengan pesantren itu sendiri.

Kiai Nur Iskandar (Pondok Pesantren al-Ihsan, Beji) secara tegas menyatakan bahwa ia mendukung partai yang membela kepentingan Nahdlatul Ulama. Dalam Islam sendiri, sudah ada seorang figur panutan, yakni Nabi Muhammad SAW. Untuk mengartikulasikan nilai-nilai itu maka umat Islam perlu memperjuangkan lewat organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama menjadi wadahnya, sekaligus pelindung bagi warga Banyumas. Sejauh ini Kiai Nur Iskandar belum aktif langsung dalam struktur partai tertentu, posisinya masih sebagai pendukung saja. Jauh sebelum kran reformasi terbuka, ia menyalurkan hak pilihnya dengan pembagian merata di setiap level, dalam pengertian bahwa hampir semua partai pernah ia pilih. Ia merasa menja-

lankan tugas sebagai warga negara yang baik sejak reformasi bergulir. Artinya, ia tidak sembarangan menyalurkan hak pilihnya, melainkan hanya kepada partai politik yang ia anggap dapat mewartakan aspirasi umat Islam. Ia juga selalu mengajak santrinya menyadari tentang perubahan politik dalam sistem kepartaian ini. Hal yang sering dikatakan pada santrinya adalah ketika mereka menjadi warga pesantren, berarti menjadi warga Nahdlatul Ulama. Maka pilihan partai adalah yang bisa mewartakan aspirasi Nahdlatul Ulama.

Di Banyumas terdapat bermacam-macam partai politik. PPP, PKB, PAN, dan Golkar mempunyai massa di Banyumas. Sejauh ini warga Banyumas sendiri masih berkisar diantara partai-partai tersebut. Warga Banyumas yang Nahdlatul Ulama pernah mencoblos semuanya, kecuali PDI-P. Hal itu terjadi karena masih ada anggapan bahwa partai tersebut milik orang-orang Kristen/Katolik. Pergeseran afiliasi partai pada masa reformasi nampaknya sudah ikut mengubah sikap masyarakat. Sebab sebelum reformasi, orang-orang Banyumas menurut Kiai ini, sulit diajak untuk membangun kebersamaan dan lebih memilih uang. Sudah banyak yang tahu, menurut Kiai Sirojudin yang termasuk Kiai muda ini, bahwa Kiai sepuh di sini *kongkalikong* dengan Golkar.

Kiai Khariri Shofa, 67 tahun, pengasuh Pondok Pesantren Haujatul Islam yang juga pernah duduk sebagai wakil ketua kepengurusan Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa Islam sebagai media pendidikan terkait erat dengan persoalan politik. Relasi itu begitu kuat, karena di Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk yang terbanyak. Urgensi ini terkait ketika membicarakan politik dalam kacamata kepentingan publik. Namun ia menekankan agar santri untuk tidak terjun langsung ke dalam politik praktis dengan berbagai alasan. Salah satunya karena partai politik lebih berorientasi pada kekuasaan. Sedang ia di sisi lain menyatakan kepada para santrinya bahwa ketika terjun ke dalam partai politik, maka mereka harus berupaya agar tetap mendasarkan semua kepentingan-

nya kepada Nahdlatul Ulama. Alasan pilihan terhadap partai yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama adalah bahwa Nahdlatul Ulama akan melanjutkannya ke dalam tindakan-tindakan riil ke masyarakat bawah

Dalam memandang politik, Kiai Fata Mu'min, 37 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren MWI Kebarongan di Banyumas mempunyai keyakinan bahwa politik itu adalah sebuah keniscayaan, sebab hidup seseorang tidak bisa dilepaskan dari realitas politik. Namun politik juga mengandung pemaknaan ganda. Ada politik dalam makna praktis, dan non praktis. Jika ingin masuk dan merebut kekuasaan, menurut Sang Kiai yang termasuk salah satu Kiai senior di Banyumas, disebut dengan politik praktis. Politik praktis seperti itulah yang tidak ia terapkan di pondok yang didirikan dan kemudian dipimpinya sendiri. Menurut Kiai ini, pesantren hanya sekedar memberi sumbangsih untuk menciptakan pemimpin yang amanah. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan, yang tugasnya hanya mendidik. Dalam konteks dunia politik, Kiai Fata meyakini bahwa sifat pesantren adalah terbuka. Meskipun pondok pesantren pada dasarnya tidak mempunyai afiliasi pada satu partai politik tertentu, dan bahkan tidak berpolitik dalam arti politik praktis, namun santri dibebaskan untuk menyalurkan aspirasi pada partai politik yang dianggap dapat mewedahi aspirasi mereka.

Terkait politik praktis, peraturan yang secara tegas di terapkan di Pondok MWI Kebarongan adalah santri dilarang membawa atribut partai ke dalam lingkungan pondok dan berkampanye. Jika ketahuan ada yang melanggar, maka ada mekanisme hukuman yang akan diterapkan oleh pihak pondok. Di pondok ini juga sering berlangsung kegiatan pengajian, yang biasanya diikuti oleh berbagai masyarakat dengan afiliasi politik yang berbeda beda. Maka jelas, tema pengajian juga yang berhubungan dengan agama dan kehidupan keseharian, bukan politik. Ada penegasan untuk tidak mencampuradukan antara politik dan agama. Sebab, agama, menurutnya, adalah untuk

umat. Organisasi atau partai politik hanya untuk segelintir individu saja, bukan umat Islam secara keseluruhan.

Pesantren tidak mencampuradukan antara politik dan agama. Dari paparan beberapa kiai di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa para kiai lebih mengedepankan kemaslahatan umat ketimbang keberpihakan pada partai. Dalam konteks ini, bila selama ini organisasi yang cukup intens berinteraksi dengan para kiai adalah Nahdlatul Ulama, baik dalam proses pengembangan pesantren ataupun forum-forum lainnya, maka Nahdlatul Ulama-lah yang kiranya dapat dianggap tepat sebagai saluran aspirasi politik mereka. Karena memang organisasi inilah yang mereka kenal dengan baik dan tentu saja telah banyak memberikan kontribusi. Kendati demikian, sikap kehati-hatian tetapi digunakan untuk bisa menjaga jarak dengan partai politik. Artinya, tidak serta merta para kiai berani membawa pesantrennya secara kelembagaan dalam pergulatan politik yang terjadi di Banyumas. Apalagi warga sekitar Banyumas tidak semuanya berafiliasi ke PKB, meski secara tradisional, sikap dan perilaku keagamaan mereka bersifat ke-NU-an.

Perilaku partai politik

Situasi sosial dan basis kultural masyarakat Banyumas yang lekat dengan tradisi kepesantrenan rupanya menjadi arena tersendiri bagi parta-partai politik yang berada di wilayah tersebut, terutama partai-partai yang basis masanya terletak pada komunitas Muslim. Bila pada Orde Baru PPP dapat mengklaim sebagai satu-satunya partai yang berbasis massa Muslim dan juga memperjuangkan ideologi Islam, namun di era reformasi hal itu tidak berlaku lagi. Kehadiran partai-partai baru dengan tipologi dan karakteristik yang sangat berneka ragam, termasuk partai yang menyebutkan dasar dan basis gerakannya Islam, hadir dengan jumlah yang tidak sedikit. Konsekuensinya, peta politik di Kampung Santri pun menemukan konfigurasi yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya.

Kehadiran PKB di satu sisi, kendati tidak mengatasnamakan partai Islam, namun basis kulturalnya justru yang paling kental di lingkungan pesantren, telah menjadi salah satu saingan terberat PPP. Oleh karena itu, masing-masing partai senantiasa membangun strategi tersendiri dalam menjaring suara di Kampung santri ini.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa interaksi intensif secara kultural dan organisasional antara Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren di Banyumas maupun masyarakat sekitar pesantren telah terjalin cukup lama, sementara di sisi lain, eksistensi PPP sebagai sebuah partai politik juga tidak kalah lamanya, setidaknya sejak awal fusi partai politik dilakukan oleh Orde Baru.

Menurut Badwan Amir, salah seorang pengurus PKB pada wilayah kecamatan, meskipun secara struktural ada, aturan yang menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama kembali ke *khithah*, ternyata aktivitas politik warga Banyumas masih banyak dimotori oleh orang-orang yang mempunyai solidaritas organik dalam Nahdlatul Ulama. Atribusi Nahdlatul Ulama agak sulit dilepaskan dalam setiap aktivitas politik warga Banyumas. Selain itu, kepedulian warga terhadap realitas politik itu tidak sebatas kepedulian moral, tetapi terlibat langsung dalam partai politik. Bentuknya ialah ikut memenangkan partai di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Perubahan yang krusial dalam aktivitas berpolitik masyarakat Banyumas sebelum dan sesudah reformasi terletak pada faktor eksternal, yaitu berbagai macam kepentingan partai politik yang ingin melibatkan warga dan pesantren Banyumas. Jadi bentuk perubahan bukan berasal dari sisi internal.

Dalam kaitanya dengan peran pesantren sebagai media sosialisasi politik, Badwan menyatakan bahwa pesantren tetap menjalankan fungsinya sebagai pemberi ilmu agama. Namun bagaimana pesantren kemudian menjadi salah satu mesin suara PKB, lebih disebabkan karena secara psikis, identitas warga Banyumas adalah Nahdliyyin. Maka dengan demikian,

afiliasi politiknya adalah PKB, yang merupakan Partai Kaum Nahdliyyin. Ini yang menyebabkan kemudian Badwan menyakini bahwa dalam diri warga Banyumas, tertanam kesadaran bahwa jika mereka harus mendukung partai yang mewadahi aspirasi Nahdlatul Ulama. Ia juga memberikan contoh ketika Alwi Shihab berkunjung ke Pesantren Al-Huda, itu semata-mata karena putra Kiai Mochtar terlibat dalam kepengurusan PKB dan orang Nahdlatul Ulama. Jadi tidak mengatasnamakan pesantrennya, melainkan relasi struktural identitas ke-NU-annya. Pada umumnya hal-hal itu terjadi secara kondisional atau dalam situasi tertentu, seperti saat krisis pemerintahan Gus Dur terjadi, atau menjelang pemilu. Pada waktu menjelang pemilu, mobilitas pesantren terasa sekali di Banyumas, terutama bila ada beberapa pengurus pesantren yang duduk dalam kepengurusan partai.

Jika ada orang partai yang sekaligus pengurus pesantren, maka secara kuantitatif sangat menguntungkan. Sebab, seperti yang telah dijelaskan di atas, pada satu sisi Nahdlatul Ulama dan PKB tidak bisa dipisahkan, demikian pula pada sisi yang lain, NU dan pesantren juga merupakan satu kesatuan⁴. Apalagi bila semua ini didukung oleh beberapa Kiai yang duduk dalam kepengurusan parpol, jelas hal yang sangat menguntungkan baik secara kualitas ataupun kuantitas. Karena, kalimat *sami"na waatho"na* makin terbukti dan PKB semakin percaya diri karena mempunyai basis masa di pesantren.

Ketimbang alasan-alasan yang bersifat ekonomis, maka alasan ideologis lebih mengemuka di mata masyarakat Banyumas saat mereka mencoba bersikap atau menentukan pilihan politik. Barangkali, faktor kuatnya tradisi dan jiwa wirausaha dari masyarakat setempat memungkinkan mereka untuk lebih independen secara ekonomi. Jadi secara garis besar, Badwan tetap optimis, basis massa PKB tetap akan dominan di Banyumas. Keyakinan Badwan ini juga didukung oleh fakta bahwa meskipun ada beberapa orang tertentu aktif di partai lain,

tetapi biasanya mereka bukan pengasuh pondok pesantren (ada yang jadi pengurus LKMD misalnya).

Dengan demikian, warga PKB tidak terlalu kesulitan untuk melakukan mobilisasi di kampung santri ini, karena telah mendapat dukungan secara kultural cukup kuat dari tokoh masyarakat setempat, khususnya para pemimpin dan pengurus pondok pesantren. Namun demikian, klaim-klaim bahwa masyarakat Banyumas adalah otomatis PKB, tentu saja tidak dapat dibuktikan secara keseluruhan. Karena sebagian tokoh masyarakat yang non-pesantren banyak yang masih berpegang teguh kepada PPP karena faktor emosional masa silam.

Kendati pada pengakuan awalnya menyatakan bahwa para pengurus PPP tidak ingin merusuh pesantren, namun hal itu juga dalam konteks tertentu dapat berubah. Relasi dengan pesantren tetap diupayakan untuk tidak terputus. Relasi antara tokoh masyarakat luar pesantren dan tokoh masyarakat dalam pesantren menjadi salah satu elemen penting untuk saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk di dalam melakukan mobilitas politik partai. Relasi tersebut tidaklah bersifat abadi, sebagaimana hal yang biasa terjadi dalam politik, semua bisa cepat berubah dari kawan menjadi lawan, atau sebaliknya.

Kesimpulan

Pemaparan tentang pergulatan politik di kampung santri, yang mengetengahkan perilaku orang-orang pesantren dan respons mereka terhadap kehadiran partai-partai politik, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bagi kiai pesantren di Banyumas, sesungguhnya berpolitik merupakan sebuah keniscayaan yang dapat dilakukan oleh semua komponen bangsa, yang itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pilihan-pilihan politik kongkretnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor, terutama faktor kultural (ideologis) dan struktural (organisasional).

Kedua, bagi partai-partai politik, posisi kiai sangat penting untuk memberikan legitimasi politik dan kultural terhadap

konstituennya. Karena itu, mendekati para kiai adalah salah satu cara yang cukup efektif di dalam melakukan mobilisasi massa untuk melakukan afiliasi politik. Namun demikian, orang-orang partai sendiri, terutama PKB dan PPP sadar bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mereka tidak secara vulgar memasuki lembaga pesantren untuk ditarik pada wilayah politik praktis.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M. Amin, 2000. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung : Mizan
- Abdullah, Taufik, 1987. "Dialog dan integrasi: Pesantren dalam Perspektif Sejarah", dalam *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES
- Alfian, 2008. *Islamic Modernism in Indonesia politics : The Muhammadiyah Movement During the Dutch Period*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Anderson, Benedict R. OG., 1990. *Language and Power ; Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaha : Cornell University
- Asykuri Ibn Chamim dkk., 2000. *Profil Muhammadiyah 2000*. Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Azra, Azyumardi, 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Bandung : Mizan
- Baehaqi, Imam, (ed.), 2012. *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Interpretasi*,.Yogyakarta : LkiS
- Bruinessen, Martin Van 1992, *Tarekat Naqshabandiyah*, Bandung : Mizan
- Bruinessen, Martin Van, 1994. *NU : Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta : LkiS
- Bruinessen, Martin van, 1999. *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan
- Dhofier, Zamachsyari, 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta : LP3ES
- Dirjosanjoto, Pradjarta, 1999. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKIS,

- Djamil, Abdul, 2001. *Perawanan Kiai Desa; Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifai Kalisasak*. Yogyakarta : LkiS
- Feillard, Andree, 1999. *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Terj. Lesmana. Yogyakarta: LkiS
- Feith, Herbert, 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press
- Geertz, Clifford, 1960. *The Religion of Java*. Chicago: Chicago University Press
- Hefner, Robert, 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press
- Hefner, Robert. W., 1985. *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. Princeton: Princeton University Press
- Horikoshi, Hiroko, 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M
- Hudgson, Marshall G.S., 1974. *The Venture of Islam: The Expansion of Islam in The Middle Period, Volume two*, Chicago & London: The University of Chicago Press
- Hurgronje, C. Snouck, 1994. *Kumpulan Karangan C. Snouck Hurgrunje*. Jakarta: INIS
- Hurgronje, C. Snouck, 1994. *Nasehat-Nasehat C. Snouck Hurgrunje Semasa Kepegawaiannya Kepada pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, jilid I-IX*. Jakarta: INIS
- Karim, A. Gaffar, 1995. *Metamorfosis: Nahdlatul Ulama dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKIS
- Kuntowijoyo, 1993. "Peranan Pesantren Dalam Pembangunan Desa", dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan
- Ma'arif, Syafi'I, 1984. *Studi Tentang Percaturan dalam Kontituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES
- Ma'arif, Syafi'I. *Islam dan Politik Belah Bambu di Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press
- Maarif, M. Syafi'I, 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Percaturan dalam konstituante*. Jakarta: LP3ES

- Madjid, Nurcholish 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina
- Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesia World: Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Marijan, Kacung, 2010. *Quo Vadis NU; setelah Kembali ke Khittah 26*. Jakarta: Erlangga
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS
- Muhtarom, Zaini, 1988. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS
- Noer, Dalier, 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti
- Rahardjo, Dawam (ed.),. *Pergumulan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M
- Rahardjo, M. Dawam, 1983. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES
- Riyadi, Muhammad Fuad, 2001. *Kampung Santri: Tatanan dari Tepi Sejarah*. Yogyakarta: Ittaqa Press
- Robertson, Roland (ed.). 1969, *Sociologi of Religion*. New York: Penguin Books
- Steenbrink, Karel A., 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES
- Syaifullah, 1984. *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Grafiti
- Ummatin, Khoiro, 2002. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ward, Kenneth E., 1974. *The 1971 Election: An East Java Case Study*. Monash: Monas University Press
- Woodward, Mark R., 1989. *Islam in Java; Normative Piety and Mysticism in The Sultanate of Yogyakarta*
- Ziemek, Manfred, 1986. *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Terj., Butche B. Soendjojo. Jakarta: P3M